



Diskusi Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan

4 Mei 2017, Jakarta

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI



DALAM RANGKA PERNINGKATAN DAYA SAING



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Yuliot

Direktur Deregulasi Penanaman Modal



DAYA SAING



Faktor Pendorong Masuknya Investasi ke Suatu Negara

- Investor memiliki sasaran strategis yang berbeda yang ingin dicapai dalam melakukan investasi atau meningkatkan investasinya disuatu negara.
- keputusan untuk berinvestasi mempertimbangkan faktor manfaat, risiko, dan biaya.

Strategi

Perusahaan melakukan investasi

Faktor Pendorong Utama

*Pertimbangan dalam pengambilan keputusan





Permasalahan Regulasi Investasi di Indonesia

- Investasi sebagai mesin pertumbuhan terhadap pertumbuhan perkeekonomian, perlu peningkatan pelaku usaha khususnya PMDN.
- 42.000 regulasi (12.000 di tingkat Pusat dan 30.000 di tingkat daerah)
- Tingkatan regulasi yang mengatur investasi berada di level Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri PerDirjen dan Perda.
- Tumpang tindihnya pengaturan jenis perizinan yang diatur berdasarkan Undang-Undang :
 - ☐ Izin Usaha yang diatur Undang-Undang sektor
 - ☐ Perizinan Tata Ruang, Pemanfaatan pesisir dan perairan, Izin Lokasi
 - ☐ Perizinan Lingkungan mengacu tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
 - ☐ Perizinan bangunan
 - ☐ Jaminan sosial ; BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
 - ☐ Dan lain-lain

Faktor Eksternal



Perlambatan ekonomi global



Penurunan harga komoditas



Persaingan dalam menarik investasi

Faktor Internal



Banyaknya Regulasi terkait Investasi (42.000, 12.000 pusat dan 30.000 daerah)

(Perizinan menjadi tumpang tindih dan memerlukan waktu yang lama)



Pengadaan tanah

(Pembebasan lahan yang sulit karena menyangkut tanah adat dan hak ulayat)



Percepatan Pembangunan Infrastruktur

(terbatasnya sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, telekomunikasi, air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan, listrik, dll)



Terbatasnya Pelaku Usaha dan Permasalahan Tenaga Kerja dan Produktivitas

(Percepatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas pelaku usaha, Tenaga Kerja Terampil/skilled labor)



Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)



Penyediaan energi listrik



Penyediaan Bahan Baku Gas untuk Industri dan Pembangkit Listrik



Insentif Penanaman Modal



Pembiayaan

Target Investasi

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
FDI	343.7	386.4	429.0	538.5	569.9	2,267.5
DDI	175.8	208.4	249.8	324.5	363.0	1,321.5
Total	519.5	594.8	678.8	863.0	933.0	3,589.0
Growth	12.2%	14.5%	14.1%	27.1%	8.1%	

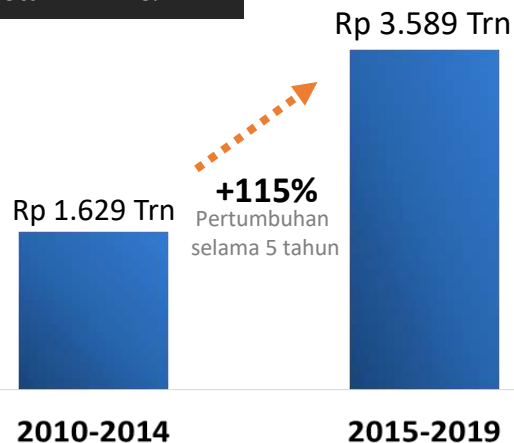
(IDR triliun) tidak termasuk sektor keuangan dan hulu migas

Rp. **3,589** triliun
Total target investasi
pada tahun 2015-2019

119% naik
Dari periode tahun 2010-2014
(Rp. 1,632.8 triliun)

15.2% Rata-rata pertumbuhan
Ditargetkan pada periode 2015-2019

Total PMDN & PMA



PMA
2015-2019

63.2 % rata-rata
Dari total target investasi
pada 2015-2019

PMDN
2015-2019

36.8 % rata-rata
Dari total target investasi
pada 2015-2019

Sumber: BKPM, 2016

Potensi Pasar Dunia

Uni Eropa (EU)

514 juta

USD 18.46 triliun

Amerika Serikat

Populasi: 322 juta

GDP: USD 17.42 triliun

China

1,368 juta

USD 10.35 triliun

India

1,252 million

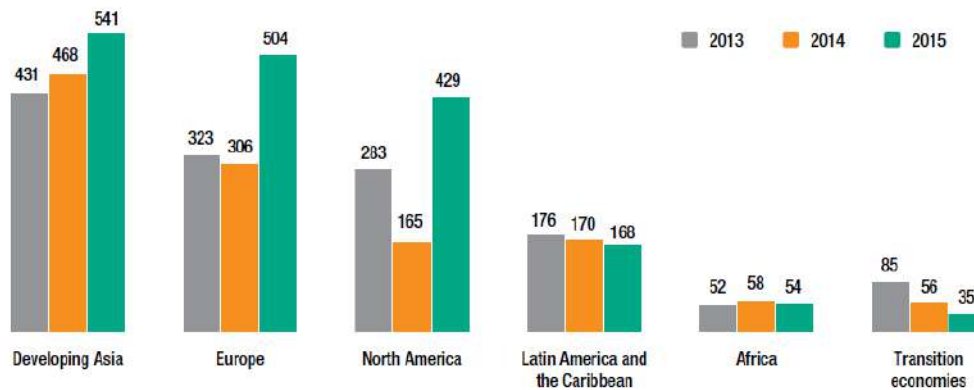
USD 2.05 triliun

ASEAN

618 juta

USD 2.16 triliun

Aliran Investasi 2013-15 Global,
UNCTAD Report (Dalam Juta Dolar)





Peran Investasi

Investasi: Salah Satu Tumpuan Ekonomi

“Ekonomi bisa seimbang jika ekspor bergerak normal.”

Presiden Joko Widodo
Sidang Kabinet, Istana Bogor
4 Januari 2017

“Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, pembiayaan pemerintah, dan neraca perdagangan. Melambatnya perekonomian akibat neraca perdagangan, menjadikan Investasi sebagai komponen penting untuk mendukung perekonomian.”

Thomas Lembong, Kepala BKPM
Peluncuran KLIK di Batam
3 Februari 2017

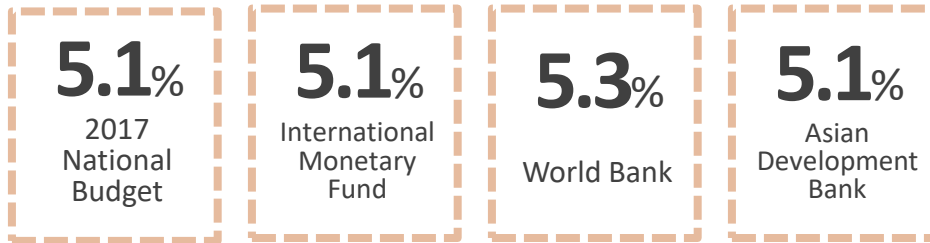
Peran Investasi

- Mendukung pertumbuhan ekonomi
- Menciptakan lapangan kerja
- Mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi
- Meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak
- Mendorong pemerataan ekonomi
- Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat



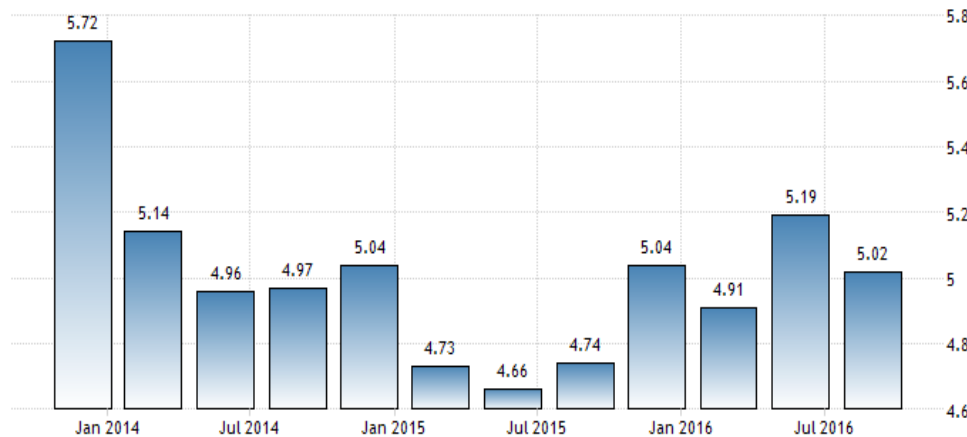
Pertumbuhan GDP yang Stabil

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2017 (y/y)



Strong household consumption, investment & gov. expenditure will keep GDP growth above 5% in 2017.

INDONESIA GDP ANNUAL GROWTH RATE



SOURCE: WWW.TRADINGECONOMICS.COM | STATISTICS INDONESIA

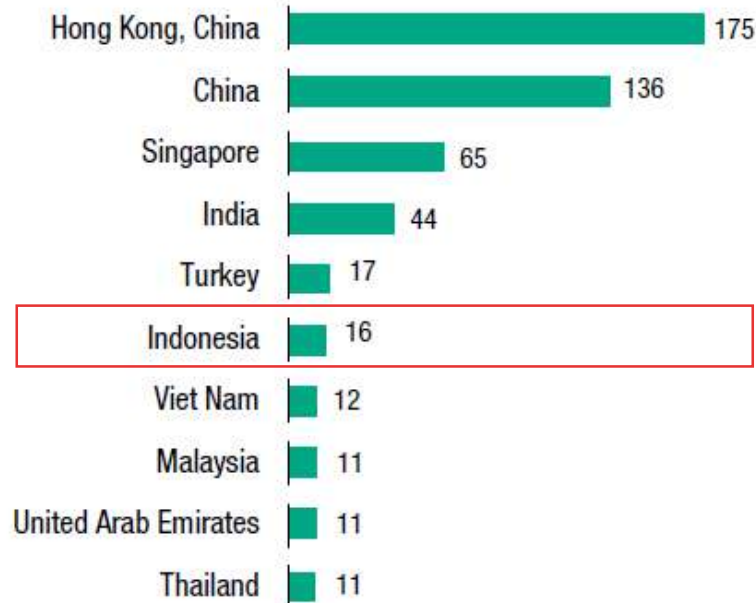
“Fondasi ekonomi Indonesia cukup kuat sehingga Indonesia masih dapat bersaing diantara negara lainnya,”
- Sri Mulyani 15 Des 2016 -

Indonesia sebagai Negara Tujuan Investasi

UNCTAD World Investment Report 2016

JBIC Report on Overseas Business Operation 2016 :
Indonesia duduk di Peringkat 3 sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan (most promising country)

Developing Asia: FDI inflows, top 10 host economies, 2015 (Billions of dollars)

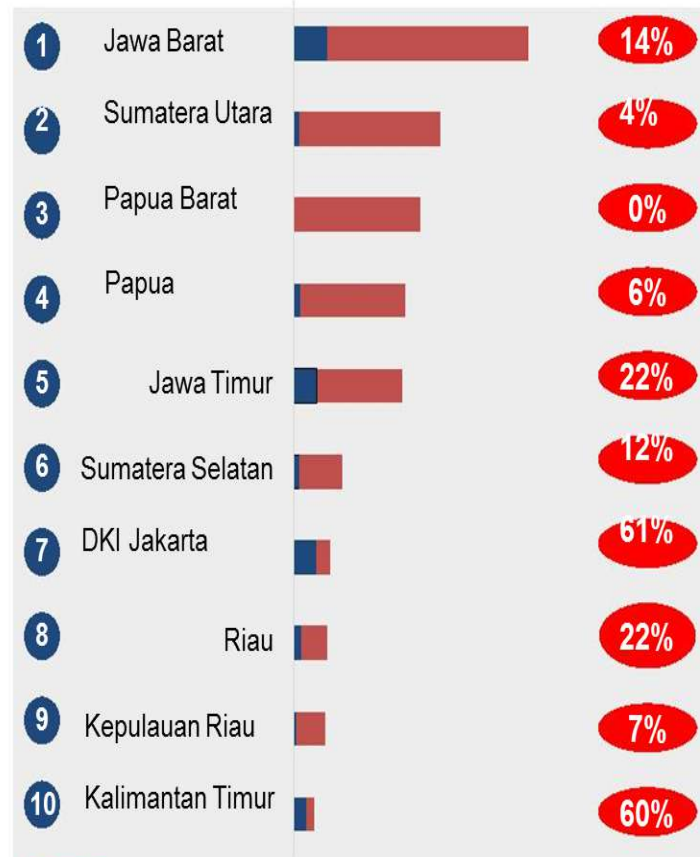


Source: ©UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).

Ranking			Country/Region (Total)	No. of Companies		Percentage Share(%)	
2016	← 2015			2016 483	2015 433	2016	2015
1	—	1	India	230	175	47.6	40.4
2	—	2	China	203	168	42.0	38.8
3	↓	2	Indonesia	173	168	35.8	38.8
4	↑	5	Vietnam	158	119	32.7	27.5
5	↓	4	Thailand	142	133	29.4	30.7
6	—	6	Mexico	125	102	25.9	23.6
7	—	7	USA	93	72	19.3	16.6
8	—	8	Philippines	51	50	10.6	11.5
9	↑	10	Myanmar	49	34	10.1	7.9
10	↓	9	Brazil	35	48	7.2	11.1
11	—	11	Malaysia	33	27	6.8	6.2
12	↑	13	Singapore	23	20	4.8	4.6
13	↑	16	Taiwan	22	16	4.6	3.7
14	↑	17	Germany	20	14	4.1	3.2
15	↓	12	Russia	17	24	3.5	5.5
16	↓	14	Korea	15	17	3.1	3.9
17	↓	14	Turkey	12	17	2.5	3.9
17	—	17	Cambodia	12	14	2.5	3.2
19	↑	24	Australia	11	4	2.3	0.9
20	↑	27	Iran	8	3	1.7	0.7

Realized dari Committed Inv per Provinsi

(Top 10 Provinsi, Dalam IDR Tn, 2011 – 2015)



XX% : Capaian Realisasi terhadap Rencana Investasi

Sumber: BKPM

Permasalahan Utama

- Top 10 Provinsi berkontribusi 90% dari Total Rencana Investasi-masih belum merata
- Potensi investasi di daerah besar, namun realisasi masih rendah
- Belum terdapat unit lintas *stakeholder* yang khusus melakukan *debottlenecking*



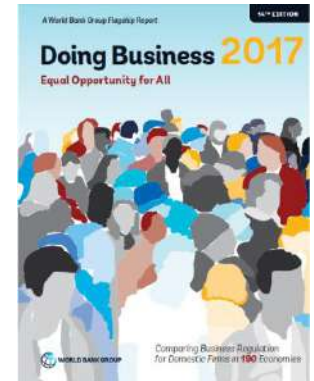
PMDN

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Jawa Timur	46.331,6	1.119
2	Jawa Barat	30.360,2	1.169
3	Jawa Tengah	24.070,4	984
4	Banten	12.426,3	496
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12.216,9	463
6	Kalimantan Barat	9.015,5	289
7	Sumatera Selatan	8.534,1	165
8	Kalimantan Tengah	8.179,1	121
9	Kalimantan Timur	6.885,1	239
10	Riau	6.613,7	289
11	Kalimantan Selatan	6.163,0	127
12	Lampung	6.031,8	72
13	Sulawesi Utara	5.069,6	74
14	Sumatera Utara	4.864,2	228
15	Jambi	3.884,4	108
16	Sumatera Barat	3.795,6	197
17	Kalimantan Utara	3.345,7	56
18	Sulawesi Selatan	3.334,6	365
19	Aceh	2.456,1	135
20	Gorontalo	2.202,5	20
21	Kepulauan Bangka Belitung	2.202,0	60
22	Sulawesi Tenggara	1.794,2	109
23	Nusa Tenggara Barat	1.342,8	33
24	Sulawesi Tengah	1.081,2	105
25	Bengkulu	949,1	31
26	Daerah Istimewa Yogyakarta	948,6	105
27	Nusa Tenggara Timur	822,2	29
28	Kepulauan Riau	492,5	130
29	Bali	482,3	94
30	Papua	220,5	65
31	Sulawesi Barat	84,1	14
32	Maluku	11,4	8
33	Papua Barat	10,6	6
34	Maluku Utara	8,8	6
TOTAL		216.230,8	7.511

PMA

NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	5.470,9	5.369
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.398,2	6.751
3	Banten	2.912,1	2.161
4	Sumatera Selatan	2.793,5	251
5	Jawa Timur	1.941,0	1.473
6	Sulawesi Tengah	1.600,3	252
7	Papua	1.168,4	169
8	Kalimantan Timur	1.139,6	466
9	Jawa Tengah	1.030,8	1.054
10	Sumatera Utara	1.014,7	688
11	Riau	869,1	394
12	Kalimantan Barat	630,7	569
13	Kepulauan Riau	519,1	880
14	Papua Barat	514,5	126
15	Bali	450,6	1.371
16	Nusa Tenggara Barat	439,0	636
17	Maluku Utara	438,9	67
18	Kalimantan Tengah	408,2	341
19	Sulawesi Utara	382,8	209
20	Sulawesi Tenggara	376,1	210
21	Sulawesi Selatan	372,5	309
22	Kalimantan Selatan	249,4	189
23	Kalimantan Utara	160,8	65
24	Aceh	134,5	111
25	Maluku	102,6	50
26	Lampung	85,7	129
27	Sumatera Barat	79,3	198
28	Jambi	61,0	161
29	Nusa Tenggara Timur	58,2	164
30	Bengkulu	55,7	59
31	Kepulauan Bangka Belitung	52,7	93
32	Sulawesi Barat	20,6	28
33	Daerah Istimewa Yogyakarta	19,6	252
34	Gorontalo	12,7	76
TOTAL		28.964,1	25.321

LAPORAN EASE OF DOING BUSINESS IFC/WORLD BANK



MALAYSIA 23



THAILAND 46



INDONESIA 91



FILIPINA 99

- **Laporan Doing Business 2017 ranking kemudahan bisnis di 190 negara pada 10 indikator**
(Memulai Usaha, Perizinan terkait Mendirikan Bangunan, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Akses Perkreditan, Perlindungan terhadap Investor Minoritas, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negara, Penegakan Kontrak, dan Penyelesaian Perkara Kepailitan)
- **Pada laporan DB 2017 Indonesia menjadi negara *Top Reformer* dalam peningkatan kemudahan berusaha dengan perbaikan di 7 indikator** (Memulai Usaha, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Akses Perkreditan, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negara dan Penegakan Kontrak)
- **Peringkat Indonesia meningkat tajam** menjadi 91 dari sebelumnya di DB2016 peringkat 109 (atau 106 setelah penyesuaian data)



TARGET DAN REALISASI INVESTASI

Renstra 2015-2019

Target Investasi

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
FDI	343.7	386.4	429.0	538.5	569.9	2,267.5
DDI	175.8	208.4	249.8	324.5	363.0	1,321.5
Total	519.5	594.8	678.8	863.0	932.9	3,589.0
Growth	12.2%	14.5%	14.1%	27.1%	8.1%	

(IDR triliun) tidak termasuk sektor keuangan
dan hulu migas

Rp. **3,589** triliun
Total target investasi
pada tahun 2015-2019

115% naik
Dari periode tahun 2010-2014
(Rp. 1,632.8 triliun)

15.1% Rata-rata pertumbuhan
Ditargetkan pada periode 2015-2019

PMA
2015-2019

63.2 % rata-rata
Dari total target investasi pada
2015-2019

PMDN
2015-2019

36.8 % rata-rata
Dari total target investasi pada
2015-2019

Sumber: BKPM, 2016



Realisasi Investasi Indonesia

Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Negara

Sesuai Capex, tidak termasuk sektor keuangan, minyak, dan gas (US\$ Juta)

No	Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Total
1	Singapura	5,565	5,123	4,856	4,671	5,832	5,901	9,178	41,128
2	Jepang	713	1,516	2,457	4,713	2,705	2,877	5,400	20,381
3	Amerika Serikat	931	1,488	1,238	2,436	1,300	893	1,161	9,447
4	Korea Selatan	329	1,219	1,950	2,205	1,127	1,213	1,065	9,108
5	Belanda	608	1,354	967	928	1,726	1,308	1,475	8,366
6	Malaysia	472	618	530	711	1,776	3,077	1,115	8,300
7	British Virgin Islands	1,616	517	856	786	624	731	1,157	6,286
8	Hong Kong	566	135	310	376	657	937	2,248	5,229
9	Inggris	276	419	934	1,076	1,588	503	306	5,103
10	R.R. Tiongkok	173	128	140	298	800	628	2,665	4,833
Total 10 Negara		11,249	12,517	14,283	18,199	18,135	18,068	25,775	118,184
Total (113 Negara)		16,215	19,475	24,565	28,618	28,530	29,276	28,964	175,641

Source: BKPM, 2016.

612.8

Rp. Triliun
Realisasi Investasi

+12.4%

*Pertumbuhan
realisasi
investasi (y/y)*

+ 20.5%

Pertumbuhan
PMDN (y-o-y)

+8.6%

Pertumbuhan PMA
(y-o-y)

Perkembangan Investasi

Realisasi Investasi Jan – Des 2016





Realisasi Januari - Desember 2016 : Berdasarkan Sektor

PMDN			
NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Industri Makanan	32.028,5	1.169
2	Industri Kimia Dasar. Barang Kimia. dan Farmasi	30.054,4	451
3	Transportasi. Gudang dan Telekomunikasi	26.769,6	364
4	Listrik. Gas. dan Air	22.794,5	472
5	Tanaman Pangan dan Perkebunan	20.998,6	543
6	Industri Mineral Non Logam	15.404,6	217
7	Konstruksi	14.039,1	365
8	Industri Logam Dasar. Barang Logam. Mesin. dan Elektronik	11.568,5	483
9	Perumahan. Kawasan Industri. dan Perkantoran	9.192,8	330
10	Pertambangan	6.033,6	134
11	Industri Kertas. Barang dari kertas. dan Percetakan	5.257,9	185
12	Perdagangan dan Reparasi	4.513,4	1.024
13	Industri Karet. Barang dari karet. dan Plastik	3.576,9	422
14	Industri Tekstil	3.209,8	284
15	Industri Kayu	3.151,0	116
16	Jasa Lainnya	2.873,2	251
17	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	1.713,9	93
18	Hotel dan Restoran	1.559,9	368
19	Industri Lainnya	744,2	93
20	Peternakan	466,0	90
21	Kehutanan	203,8	16
22	Industri Kulit. Barang dari kulit. dan Sepatu	69,1	21
23	Industri Instrumen Kedokteran. Presisi. Optik. dan Jam	5,0	7
24	Perikanan	2,6	19
TOTAL		216.230,8	7.517

PMA			
NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Industri Logam Dasar. Barang Logam. Mesin dan Elektronik	3.895,7	2.181
2	Pertambangan	3.132,1	1.129
3	Industri Kimia Dasar. Barang Kimia dan Farmasi	2.875,9	1.091
4	Industri Kertas. Barang dari kertas dan Percetakan	2.786,6	273
5	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	2.352,3	926
6	Perumahan. Kawasan Industri dan Perkantoran	2.198,1	1.144
7	Listrik. Gas dan Air	2.116,5	741
8	Industri Makanan	2.073,7	1.942
9	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1.570,8	798
10	Industri Mineral Non Logam	1.076,0	397
11	Hotel dan Restoran	874,5	2.023
12	Jasa Lainnya	818,2	2.923
13	Industri Karet. Barang dari karet dan Plastik	734,0	710
14	Perdagangan dan Reparasi	670,1	5.535
15	Transportasi. Gudang dan Telekomunikasi	668,0	619
16	Industri Tekstil	316,8	885
17	Industri Kayu	267,5	240
18	Konstruksi	186,7	436
19	Industri Kulit. Barang dari kulit dan Sepatu	143,1	276
20	Kehutanan	78,2	108
21	Industri Lainnya	74,4	595
22	Peternakan	44,5	149
23	Perikanan	43,3	124
24	Industri Instrumen Kedokteran. Presisi. Optik dan Jam	8,8	22
TOTAL		29.005,8	25.267



Realisasi Januari - Desember 2016 : Berdasarkan Lokasi

PMDN			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Jawa Timur	46.331,57	1.119
2	Jawa Barat	30.360,21	1.169
3	Jawa Tengah	24.070,35	987
4	Banten	12.426,31	496
5	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	12.216,93	463
6	Kalimantan Barat	9.015,53	289
7	Sumatera Selatan	8.534,15	165
8	Kalimantan Tengah	8.179,10	121
9	Kalimantan Timur	6.885,13	239
10	Riau	6.613,75	289
11	Kalimantan Selatan	6.163,01	128
12	Lampung	6.031,81	72
13	Sulawesi Utara	5.069,59	74
14	Sumatera Utara	4.864,24	228
15	Jambi	3.884,45	108
16	Sumatera Barat	3.795,58	197
17	Kalimantan Utara	3.345,65	56
18	Sulawesi Selatan	3.334,59	366
19	Aceh	2.456,09	135
20	Gorontalo	2.202,54	20
21	Kepulauan Bangka Belitung	2.201,96	60
22	Sulawesi Tenggara	1.794,24	109
23	Nusa Tenggara Barat	1.342,78	33
24	Sulawesi Tengah	1.081,24	105
25	Bengkulu	949,08	31
26	Daerah Istimewa Yogyakarta	948,61	105
27	Nusa Tenggara Timur	822,18	29
28	Kepulauan Riau	492,51	130
29	Bali	482,32	95
30	Papua	220,54	65
31	Sulawesi Barat	84,05	14
32	Maluku	11,38	8
33	Papua Barat	10,61	6
34	Maluku Utara	8,77	6
TOTAL		216.230,85	7.517

PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	5.398,5	5.359
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.192,8	6.746
3	Banten	2.903,8	2.139
4	Sumatera Selatan	2.773,2	247
5	Jawa Timur	1.941,0	1.474
6	Sulawesi Tengah	1.600,3	252
7	Papua	1.561,8	169
8	Kalimantan Timur	1.124,8	461
9	Jawa Tengah	1.030,6	1.050
10	Sumatera Utara	1.014,7	688
11	Riau	869,1	394
12	Kalimantan Barat	630,7	569
13	Kepulauan Riau	519,1	880
14	Papua Barat	496,5	123
15	Bali	450,6	1.371
16	Nusa Tenggara Barat	439,0	636
17	Maluku Utara	438,9	67
18	Kalimantan Tengah	408,2	341
19	Sulawesi Utara	382,8	209
20	Sulawesi Tenggara	376,1	210
21	Sulawesi Selatan	367,4	307
22	Kalimantan Selatan	249,4	189
23	Kalimantan Utara	153,6	65
24	Aceh	134,5	111
25	Maluku	102,6	50
26	Lampung	85,7	129
27	Sumatera Barat	79,3	198
28	Jambi	61,0	161
29	Nusa Tenggara Timur	58,2	164
30	Bengkulu	55,7	59
31	Kepulauan Bangka Belitung	52,7	93
32	Sulawesi Barat	20,6	28
33	Daerah Istimewa Yogyakarta	19,6	252
34	Gorontalo	12,7	76
TOTAL		29.005,78	25.267

165.8

Rp. Triliun
Realisasi Investasi

+13.2%

*Pertumbuhan
realisasi
investasi (y/y)*

+ 36.5%

Pertumbuhan
PMDN (y-o-y)

+0.9%

Pertumbuhan PMA
(y-o-y)

Perkembangan Investasi

Realisasi Investasi Q1 2017



Triwulan I 2017: Sektor, Lokasi, Negara Asal, dan Wilayah
Realisasi Triwulan I 2017: Berdasarkan Sektor



PMDN			
NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	15.985,02	114
2	Industri Makanan	12.114,96	288
3	Pertambangan	8.093,72	35
4	Listrik, Gas dan Air	7.294,00	168
5	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	4.077,16	103
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	3.988,76	102
7	Tanaman Pangan dan Perkebunan	3.833,22	154
8	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3.316,55	115
9	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	2.352,14	37
10	Industri Tekstil	1.954,03	36
11	Industri Mineral Non Logam	1.102,43	49
12	Hotel dan Restoran	1.068,06	63
13	Konstruksi	1.047,65	61
14	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	1.041,79	69
15	Perdagangan dan Reparasi	602,76	249
16	Industri Kayu	223,17	20
17	Jasa Lainnya	197,67	79
18	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	195,08	20
19	Industri Lainnya	148,24	23
20	Peternakan	110,47	16
21	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu	13,33	4
22	Kehutanan	2,91	3
23	Perikanan	1,71	4
TOTAL		68.764,82	1.812

PMA			
NO	BIDANG USAHA	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Pertambangan	1.165,39	232
2	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	838,25	287
3	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	779,94	302
4	Listrik, Gas dan Air	706,76	258
5	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	503,53	152
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	484,69	178
7	Industri Makanan	476,32	416
8	Tanaman Pangan dan Perkebunan	450,13	228
9	Hotel dan Restoran	394,86	481
10	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	295,14	95
11	Industri Mineral Non Logam	231,96	90
12	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	179,71	134
13	Jasa Lainnya	175,71	534
14	Perdagangan dan Reparasi	166,57	962
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Sepatu	146,57	27
16	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	115,96	51
17	Industri Tekstil	108,26	83
18	Industri Lainnya	21,73	87
19	Peternakan	15,31	56
20	Kehutanan	13,73	24
21	Industri Kayu	11,92	34
22	Konstruksi	6,76	61
23	Perikanan	4,32	25
24	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	0,17	3
TOTAL		7.293,70	4.800



Realisasi Triwulan I 2017: Berdasarkan Lokasi

PMDN

NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK
1	DKI Jakarta	11.807,58	132
2	Jawa Timur	9.390,60	293
3	Jawa Barat	9.102,21	180
4	Banten	5.488,51	111
5	Jawa Tengah	4.973,66	224
6	Sumatera Utara	4.311,50	64
7	Kalimantan Timur	3.197,22	53
8	Riau	3.001,68	74
9	Sumatera Selatan	2.631,46	75
10	Kalimantan Barat	2.439,26	76
11	Nusa Tenggara Barat	2.199,98	21
12	Kalimantan Selatan	1.850,55	28
13	Lampung	1.589,92	9
14	Sulawesi Tenggara	1.406,20	25
15	Kepulauan Bangka Belitung	1.258,67	15
16	Sumatera Barat	570,59	67
17	Aceh	503,39	43
18	Jambi	385,18	32
19	Nusa Tenggara Timur	362,82	24
20	Papua	353,05	17
21	Maluku Utara	344,07	2
22	Kalimantan Tengah	316,07	26
23	Sulawesi Utara	257,61	20
24	Sulawesi Tengah	257,21	27
25	Sulawesi Selatan	251,63	60
26	Sulawesi Barat	104,86	3
27	Kepulauan Riau	103,53	45
28	Gorontalo	82,39	6
29	Bali	79,03	17
30	DI Yogyakarta	72,29	24
31	Kalimantan Utara	62,06	10
32	Maluku	10,00	3
33	Bengkulu	0,00	6
34	Papua Barat	0,00	0
TOTAL		68.765	1.812

PMA

NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	1.520,28	651
2	DKI Jakarta	934,74	1.378
3	Papua	589,76	57
4	Jawa Tengah	518,92	168
5	Banten	515,20	368
6	Kalimantan Timur	300,16	105
7	Kepulauan Riau	275,70	159
8	Sulawesi Tenggara	272,19	38
9	Sulawesi Tengah	269,24	57
10	Jawa Timur	242,45	298
11	Kalimantan Tengah	208,88	87
12	Sumatera Selatan	203,59	83
13	Sulawesi Selatan	201,89	68
14	Sumatera Utara	195,31	152
15	Kalimantan Barat	190,62	147
16	Sulawesi Utara	151,49	54
17	Bali	135,24	301
18	Riau	114,16	71
19	Maluku	91,92	10
20	Kalimantan Selatan	75,40	24
21	Kepulauan Bangka Belitung	48,33	29
22	Lampung	34,97	34
23	Maluku Utara	32,23	15
24	Nusa Tenggara Barat	30,56	197
25	Nusa Tenggara Timur	28,95	54
26	Jambi	27,84	21
27	Papua Barat	24,45	25
28	Kalimantan Utara	24,37	27
29	Bengkulu	13,72	15
30	Sulawesi Barat	8,80	9
31	Sumatera Barat	5,53	35
32	DI Yogyakarta	3,76	26
33	Gorontalo	2,09	14
34	Aceh	0,95	23
TOTAL		7.293,702	4.800

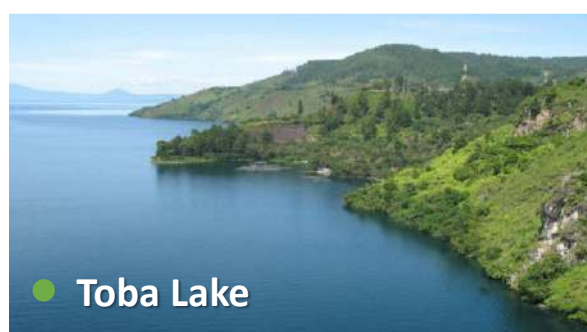


PENGEMBANGAN SEKTOR PRIORITAS



INFRASTRUKTUR		35.000 MW Pembangkit Listrik	24 Pelabuhan		
PERTANIAN		Food Estate	Jagung	Sapi	
INDUSTRI	Padat Karya	Tekstil	Makanan & Minuman	Furnitur	Alas Kaki
	Substitusi Impor	Kimia & Farmasi	Besi & baja	Komponen	
	Orientasi Ekspor	Elektronik	Kelapa Sawit & Produk Turunan	Produk kayu, kertas dan bubur kertas	Otomotif
		Permesinan	Produk Karet	Ikan dan produk turunan	Udang
	Hilirisasi	Kakao	Gula	Smelter	
MARITIM		Perkapalan	Perikanan	Cold storage	
PARIWISATA DAN KAWASAN		10 KEK pariwisata	8 KEK existing	7 KEK baru	15 Kawasan Industri

10 Kawasan Pengembangan Pariwisata Baru



● Toba Lake



● A. KEK Tanjung Lesung



● Tanjung Kelayang



● Bromo Tengger Semeru



● B. KEK Mandalika



● Kepulauan Seribu



● Komodo



● C. KEK Morotai



● Borobudur



● Wakatobi



PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Paket Kebijakan Ekonomi



Sistem UMR yang lebih terprediksi



Insentif pajak untuk industri padat karya



Pengurangan waktu Dwelling time



Daftar negative investasi yang lebih terbuka



Kebijakan kemudahan entry visa



Insentif untuk industri transportasi



Percepatan pengembangan infrastruktur dan pembangkit listrik



Layanan perizinan 3 jam di BKPM



Tarif listrik yang lebih rendah untuk industri



Insentif pajak untuk properti



Percepatan perizinan tanah

EODB

Ease of Doing Business Improvement



Perumahan terjangkau untuk rakyat

e-

commerce

Insentif untuk pengembangan e-commerce

Pokja I Kampanye dan Diseminasi Kebijakan

**Ketua : Menteri Perdagangan
Wakil Ketua : Kepala BKPM**

Pokja II Percepatan dan Penuntasan Regulasi

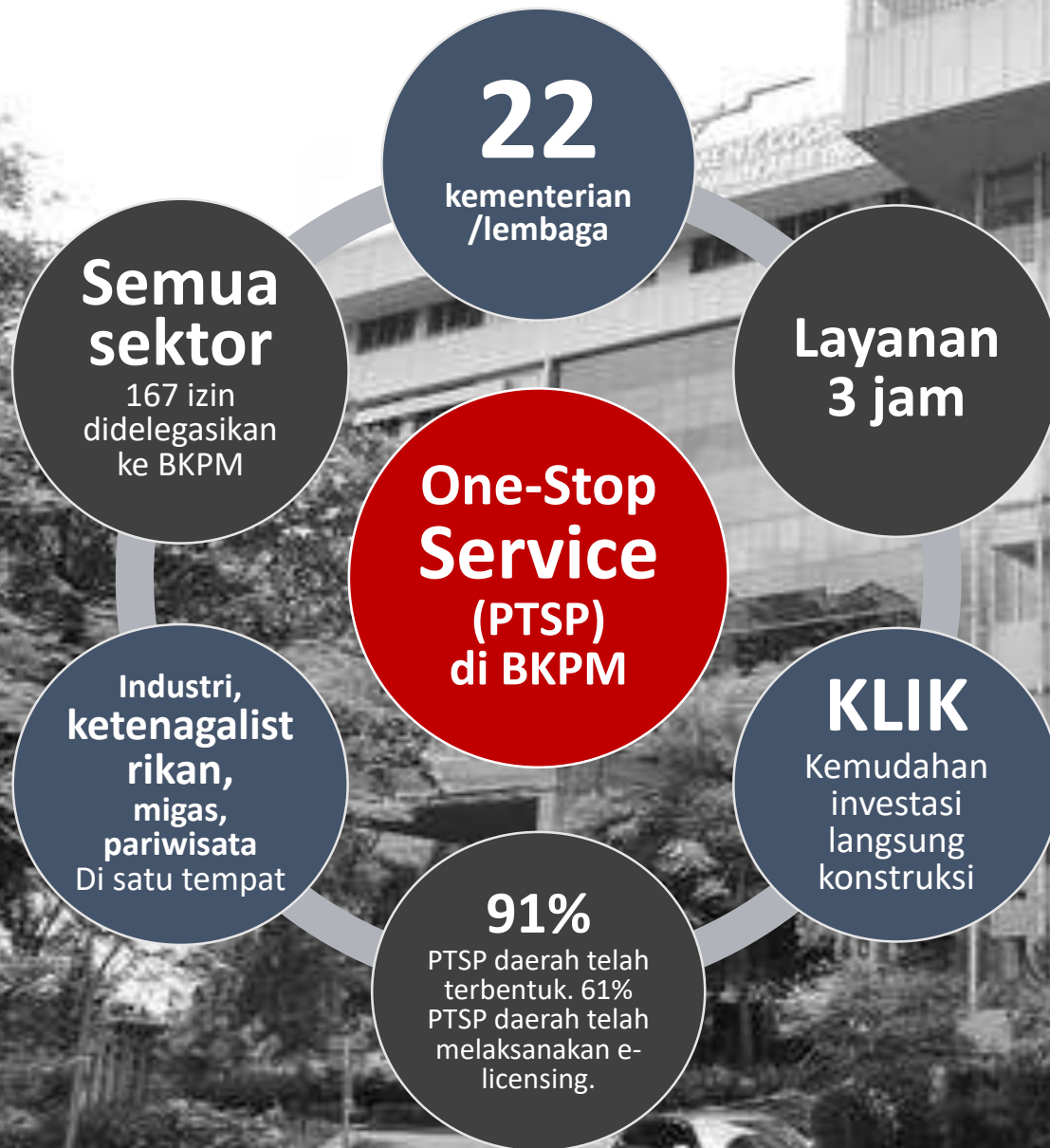
**Ketua : Kepala Kantor Staf Presiden
Wakil Ketua : Menteri Sekretaris Negara**

Pokja III Evaluasi dan Analisa Dampak

**Ketua : Deputy Senior Bank Indonesia
Wakil Ketua : Ekonom Senior**

Pokja IV Penanganan dan Penyelesaian Kasus

**Ketua : Menteri Hukum dan HAM
Wakil Ketua : Staf Khusus Menpolhukam**



**Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP)
Pusat di BKPM**

II3J – Izin Investasi 3 Jam

Cepat, tepat dan akuntabel

(launching 26.01.2016)

9 produk (8+1)

Izin Investasi, Akta Pendirian + SK KumHAM, NPWP, TDP, APIP, NIK, RPTKA, IMTA, Informasi Blocking Tanah

KRITERIA DASAR : minimum investasi Rp. 100 M atau mempekerjakan 1,000 org

khusus TANPA KRITERIA :

untuk industri dengan fasilitas IFTA, *supply chain*, berlokasi di KEK, di bidang usaha infrastruktur dan program tax amnesty

Capaian kinerja :

284

Proyek PMA/PMDN telah memanfaatkan layanan Investasi 3 Jam



Rp. 869 Triliun
Total Rencana Investasi

170 Ribu
Rencana Penyerapan Tenaga Kerja

	Jumlah Proyek	Rencana Investasi	Rencana Penyerapan Tenaga Kerja
PMA	250	Rp 782.535.074.156.731	150.791 orang
PMDN	34	Rp 86.126.361.619.064	19.938 orang
Total	284	Rp 869.061.435.775.795	170.657 orang

ESDM3J – Izin Sektor ESDM 3 Jam

Cepat, tepat dan akuntabel
(launching 30.01.2017)

9 Jenis Perizinan
dapat diterbitkan melalui
Layanan ESDM3J

TANPA KRITERIA

PERSYARATAN

Layanan ESDM3J diberikan bila telah memenuhi daftar persyaratan (*checklist*) meliputi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.15/2016

	JENIS PERIZINAN	LAYANAN REGULER
1.	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara	20 Hari Kerja
2.	Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG	32 Hari Kerja
3.	Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG	32 Hari Kerja u/ Hasil Olahan 40 Hari Kerja u/ CNG
4.	Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG	32 Hari Kerja
5.	Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi	32 Hari Kerja
6.	Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan	32 Hari Kerja
7.	Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi	32 Hari Kerja
8.	Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM	40 Hari Kerja
9.	Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan	40 Hari Kerja

Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2016



Pelayanan Perizinan 3 Jam untuk Mendukung Tax Amnesty

Berlaku bagi **perusahaan dan wajib pajak pribadi** yang berpartisipasi dalam **program tax amnesty**

- Investasi baru, perluasan, dan perubahan status menjadi PMDN
- Perubahan pemegang saham perusahaan

Tidak harus memenuhi persyaratan nilai minimal investasi **Rp. 100 Miliar dan/atau 1000 tenaga kerja**, hanya dipersyaratkan surat keterangan tax amnesty dari Direktorat Jenderal Pajak

Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

Investor dapat langsung melakukan konstruksi proyek sambil secara paralel mengurus izin mendirikan bangunan untuk kawasan industri. Layanan ini merupakan kerjasama dan koordinat antara **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**



Memperoleh izin investasi dari PTSP Pusat maupun Daerah

- **Survei** ketersediaan lahan pada kawasan industri tertentu
- **Memesan dan Memperoleh** lahan di kawasan industri.

- **Memulai konstruksi proyek.** Tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan.
- **Mengajukan** IMB serta UKL/UPL, secara paralel dengan proses konstruksi.

Tanpa Persyaratan

- Tidak ada minimal besar investasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap.
- IMB dapat diperoleh bersamaan dengan proses konstruksi

14 Kawasan Industri Lokasi KLIK Tahap 1



Ditetapkan melalui SK Ka. BKPM No. 24/2016



1

Prov. Sumatera Utara
(1 KI, Lahan tersedia 100 ha)

Kawasan Industri Medan/KIM
(100 ha)

3

Prov. Jawa Barat
(5 KI, Lahan tersedia
1.151 ha)

1. Bekasi Fajar Industrial Estate/BFIE (300 ha)
2. Delta Silicon 8 (158 ha)
3. Karawang Internasional Industrial City/KIIC (293 ha)
4. Suryacipta City of Industry/SCI (300 ha)
5. GT Tech Park @ Karawang (100 ha)

2

Prov. Banten
(3 KI, Lahan tersedia
3.150 ha)

1. Modern Cikande Industrial Estate/MCIE (1.800 ha)
2. Wilmar Integrated Industrial Park/WIIP (Lahan Tersedia: 800 ha)
3. Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC (Lahan Tersedia: 570 ha)

5

Prov. Jawa Timur
(1 KI, Total Lahan 1.761 ha)

KI Java Integrated Industrial and Port Estate/JIPE (Lahan Tersedia: 1.761 ha)

4

Prov. Jawa Tengah
(3 KI, Total Lahan 840 ha)

1. Kendal Industrial Park/KIP (Lahan Tersedia: 700 ha)
2. Bukit Semarang Baru/BSB (Lahan Tersedia: 40 ha)
3. Wijayakusuma Industrial Estate/KIW (Lahan Tersedia: 100 ha)

6

Prov. Sulawesi Selatan
(1 KI, Total Lahan 3.000 ha)

Bantaeng Industrial Park (BIP)
(Lahan Tersedia: 3.000 ha)

Berdasarkan Wilayah

12 Lokasi di P. Jawa (6.902 Ha)
2 Lokasi di Luar P. Jawa (3.100 Ha)

13 Lokasi di KBI (4.079,8 Ha)
1 Lokasi di KTI (3.000 Ha)

18 Kawasan Industri Calon Lokasi KLIK Tahap 2



1

Prov. Kep. Riau
(5 KI, Total Lahan tersedia
556 ha)

1. KI Batamindo Industrial Park (61,4 ha)
2. KI Bintang Industrial Park II (20 ha)
3. KI Kabil Integrated Industrial Estate (142,5 ha)
4. KI Bintan Inti Industrial Estate (229,6 ha)
5. KI West Point Maritim Industrial Park (102,5 ha)

2

Prov. Riau
(1 KI, Total Lahan tersedia
198,9 ha)

1. KI Dumai (198,9 ha)

3

Prov. DKI Jakarta
(2 KI, Total Lahan 129 ha)

1. Kawasan Berikat Nusantara/KBN (118,6 ha)
2. KI Jakarta Industrial Estate Pulagadung/JIEP (10,4 ha)

4

Prov. Jawa Barat
(6 KI, Total Lahan 1.814,1 ha)

1. Artha Industrial Hill (315,1 ha)
2. KI Greenland International Industrial Center (GIIC)/Deltamas (400 ha)
3. KI Jababeka Tahap III (45 ha)
4. KI Kota Bukit Indah Ind. City (510 ha)
5. KI Indotaisei Kota Bukit Indah (300 ha)
6. KI Marunda Center (300 ha)

5

Prov. Jawa Tengah
(1 KI, Total Lahan 285,7 ha)

- KI Demak (285,7 ha)

6

Prov. Jawa Timur
(2 KI, Total Lahan 341 ha)

- KI Maspion (151 ha)
KI Tuban (190 ha)

7

Prov. Kalimantan Timur
(1 KI, Total Lahan 133,8 ha)

- KI Kariangau (133,8 ha)

Berdasarkan Wilayah

11 Lokasi di P. Jawa (2.569,8 Ha)
7 Lokasi di Luar P. Jawa (888,7Ha)

17 Lokasi di KBI (3.324,7Ha)
1 Lokasi di KTI (133,8 Ha)

Catatan: Terdapat penambahan sebanyak 1 (satu) Kawasan Industri (sebelumnya 17 KI) yaitu **Kawasan Industri Westpoint Maritim** di Provinsi Kepulauan Riau yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi dan teknis per tanggal 15 Januari 2017

PENYELESAIAN KEPABEANAN

(CUSTOMS CLEARANCE)

4 status pengecekan kepabeanan:

• **Jalur Merah** untuk perusahaan baru.
Dilakukan pemeriksaan fisik & dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.

• **Jalur Kuning**

Hanya dilakukan pengecekan dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.

• **Jalur Hijau**

Pengecekan dokumen dilakukan setelah barang dipindahkan dari pelabuhan.

• **Prioritas Mitra Utama** untuk perusahaan dengan track record yang terbukti baik. Tidak diperlukan pengecekan.

Fasilitas Baru:

Peningkatan Status

dari jalur merah ke jalur hijau untuk perusahaan baru yang dalam tahap konstruksi

Fasilitas Impor Barang Modal

Percepatan dan kepastian dalam pemrosesan customs clearance

Lebih cepat dan pasti

- Tidak perlu screening barang modal.
- Memotong waktu pemrosesan dari 3-5 hari menjadi hanya 30 menit.

Persyaratan mudah

- Proyek dalam tahap konstruksi
- Memenuhi kewajiban pelaporan LKPM Triwulanan ke BKPM
- Rekomendasi dari BKPM



● Sebelum ● Setelah

*E-Commerce**

Film : Produksi, Pasca-
Produksi, Distribusi, Bioskop

Cold-Storage

Bar dan Cafe

Restoran

Jasa Manajemen
Rumah Sakit,
Laboratorium Klinik,
Clinic Medical Check Up

Industri Bahan Baku
Farmasi

Pengusahaan jalan tol

Pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi (tes laboratorium)

Pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya

*Nilai Investasi diatas Rp 100 Miliar, Batasan Kepemilikan Modal Asing untuk Rp. 100 Miliar kebawah

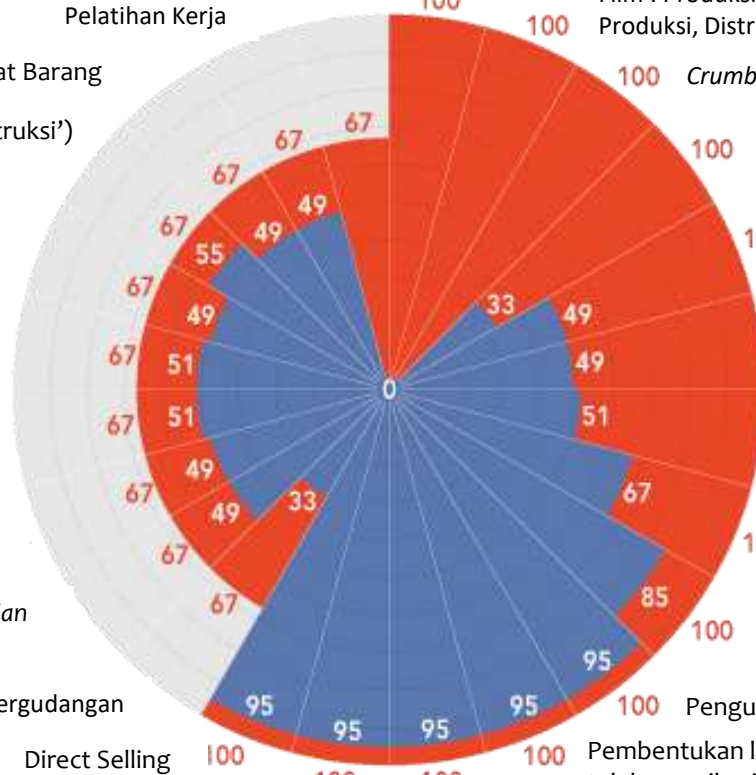
****Perizinan Khusus dari Menteri Perindustrian**

***100% untuk distributor yang terafiliasi degan produksi

‘)pembatasan untuk nilai investasi lebih dari Rp 10 Miliar

“)tidak dapat berdiri sendiri

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal



Revisi DNI mencakup **141 Bidang usaha**, diagram (kiri) menggambarkan sebagian perubahan dimaksud.

No.	Sektor	Rev.
1	Pertanian	8
2	Kehutanan	5
3	Kelautan dan Perikanan	6
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	6
5	Perindustrian	4
6	Pertahanan dan Keamanan	3
7	Pekerjaan Umum	5
8	Perdagangan	9
9	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	37
10	Perhubungan	14
11	Komunikasi dan Informatika	7
12	Kuangan	6
13	Perbankan	3
14	Ketenagakerjaan	2
15	Pendidikan	1
16	Kesehatan	25
Total		141

REFORMASI EODB, DORONG KEMUDAHAN BERUSAHA

Perbaikan kemudahan berusaha yang digalakkan Pemerintah Indonesia selama periode 2015-2016.

Memulai usaha **KINI LEBIH MUDAH**



Tidak ada lagi persyaratan
modal minimal

Pendaftaran PT kini **online**,
selesai dalam hitungan menit

Pendaftaran Properti **KINI LEBIH CEPAT**



1 hari pengecekan sertifikat tanah
(sebelumnya 3 hari)

Pendaftaran Peralihan Hak dan PBB
dilakukan bersamaan di Kantor Pertanahan

Mendirikan Bangunan **KINI LEBIH MUDAH**



1 kali inspeksi bangunan
(sebelumnya 4 kali)

Tidak lagi dipersyaratkan UKL/UPL
SLF dan TDG **diproses paralel**

Penyambungan listrik **LEBIH CEPAT LEBIH MURAH**



20% pengurangan biaya
sambungan (969 → 775/VA)

15% pengurangan biaya SLO
(17,5 → 15/VA)

22 Proses penyambungan listrik PLN
(sebelumnya 80 hari)
hari

Lapor – bayar pajak **KINI ONLINE**



Online untuk PPh Badan dan PPN
Online untuk BPJS Kesehatan
Online untuk BPJS Ketengakerjaan

Penegakkan Kontrak **KINI LEBIH PASTI**



Ada **Pengadilan Gugatan Sederhana**

25 Proses penegakkan kontrak
(sebelumnya 471 hari)
hari

PENUTUP

1. Diperlukan kebijakan yang lebih pro investasi untuk memberikan nilai tambah produk dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.
2. Dukungan legislatif dan Badan Keahlian DPR RI untuk harmonisasi regulasi dan untuk tidak membuat persyaratan perizinan dan batasan kepemilikan saham pada Undang-undang sektor.
3. Dukungan daerah dilakukan antara lain dengan menghapus perda-perda yang tidak pro investasi dan menyusun perda-perda sebagai implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.



Indonesia Investment
Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment
Coordinating Board

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia

Call center : 0807 100 2576 (BKPM)

www.bkpm.go.id

e . info@bkpm.go.id

